



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR **60** TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 906-713-2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

- f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.141.037.943,00 (*dua belas milyar seratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*);
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.636.661.036,00 (*lima milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah*);
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.872.767.023,00 (*delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah*);
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.109.901.387,00 (*satu milyar seratus sembilan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.288.512.584,00 (*lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*);
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.432.088.535,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*);
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.86.977.531,00 (*delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*);
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.606.028.547,00 (*tiga milyar enam ratus enam juta dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*);
 - (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.526.394.757,00 (*sebelas milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.28.656.743.070,00 (*dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.410.371.479,00 (*lima milyar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh sembilan rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.710.371.591,00 (*dua puluh dua milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.536.000.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam juta rupiah*);

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.795.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.795.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.58.956.867.166,00 (*lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;

- c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD; dan
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.214.186.000,00 (*dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.814.500.000,00 (*dua puluh milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.900.000.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus juta rupiah*).
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
 - (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*).
 - (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.099.078,00 (*tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah*).
 - (8) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.238.528,00 (*dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*).
 - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.28.950.843.560,00 (*dua puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
 - (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.583.196.715.875,00 (*lima ratus delapan puluh tiga*

milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.560.311.277.875,00 (*lima ratus enam puluh milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.885.438.000,00 (*dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.560.311.277.875,00 (*lima ratus enam puluh milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.514.779.721.875,00 (*lima ratus empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.531.556.000,00 (*empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.22.885.438.000,00 (*dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.14.820.500.000,00 (*empat belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.022.748.026,00 (*dua puluh lima milyar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.690.800.000,00 (*satu milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.332.361.032.214,00 (*tiga ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh satu ribu tiga puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.179.940.719.381,00 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.985.594.077,00 (*sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.616.580.559,00 (*empat puluh dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.810.175.094,00 (*sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah*).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.744.701.003,00 (*tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu tiga rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.035.764.000,00 (*satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.587.498.100,00 (*dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.179.940.719.381,00 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.070.252.547,00 (*seratus tiga puluh lima milyar tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.907.988.627,00 (*dua belas milyar sembilan ratus*

tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.098.866.750,00 (*enam milyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).*
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.764.777.650,00 (*lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).*
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.035.168.500,00 (*tiga milyar tiga puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).*
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.849.722.316,00 (*enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah).*
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.336.222.024,00 (*tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).*
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.111.505,00 (*dua juta seratus sebelas ribu lima ratus lima rupiah).*
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.762.345.834,00 (*delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).*
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.278.581.777,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).*
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.834.681.851,00 (*delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).*

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.985.594.077,00 (*sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.087.100.505,00 (*lima puluh tiga milyar delapan puluh tujuh juta seratus ribu lima ratus lima rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.761.045.000,00 (*satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.178.481.530,00 (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.958.967.042,00 (*tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.616.580.559,00 (*empat puluh dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium; dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.440.173.102,00 (*satu milyar empat ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.814.061.457,00 (*delapan ratus empat belas juta enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.109.056,00 (*tiga puluh satu juta seratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.237.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.972.540.000,00 (*tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.043.750.000,00 (*satu milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.810.175.094,00 (*sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;

- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.840.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.375.000,00 (*lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.150.000.000,00 (*tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
 - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.787.500.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.700.094,00 (*tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*).
 - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.466.600.000,00 (*dua milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).
 - (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.600.000.000,00 (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*).

- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.744.701.003,00 (*tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.965.000,00 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00 (*seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.200.000,00 (*delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.624 (*dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*).

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.588.080,00 (*enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.134.316,00 (*seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.402.948,00 (*empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.299.979.363,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.264.091.672,00 (*dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.035.764.000,00 (*satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS.

Pasal 23

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.587.498.100,00 (*dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.271.300.283.730,00 (*dua ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.500.603.082,00 (*lima puluh satu milyar lima ratus juta enam ratus tiga ribu delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.129.848.472.916,00 (*seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.411.731.392,00 (*sembilan belas milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.129.120.025,00 (*empat puluh lima milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.756.450.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.500.603.082,00 (*lima puluh satu milyar lima ratus juta enam ratus tiga ribu delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.268.903.082,00 (*lima puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.231.700.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.129.848.472.916,00 (*seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.113.058.628.929,00 (*seratus tiga belas milyar lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.199.949.506,00 (*enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.92.000.000,00 (*sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.035.500.000,00 (*dua milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.288.150.004,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.500.000,00 (*tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.235.520.000,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.114.510.684,00 (*dua milyar seratus empat belas juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.222.000.000,00 (*dua ratus dua puluh dua juta rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.972.038.000,00 (*satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.217.118.266,00 (*dua ratus tujuh belas juta seratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.378.557.527,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.411.731.392,00 (*sembilan belas milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.530.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.703.006.849,00 (*dua belas milyar tujuh ratus tiga juta enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.921.325.058,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.499.369.485,00 (*dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.265.500.000,00 (*dua milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.129.120.025,00 (*empat puluh lima milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.949.120.025,00 (*empat puluh empat milyar*

sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.756.450.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.749.450.000,00 (*satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).

Pasal 30

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.277.448.300,00 (*sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 31

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.365.708.015,00 (*dua belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu lima belas rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.022.748.026,00 (*dua puluh lima milyar dua puluh*

dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.287.100.500,00 (*dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.287.100.500,00 (*dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.508.472.500,00 (*sembilan milyar lima ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.213.628.000,00 (*empat belas milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.565.000.000,00 (*lima ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.690.800.000,00 (*satu milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.800.000,00 (*seratus juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.540.000.000,00 (*satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 36

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.800.000,00 (*seratus juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Pasal 37

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.540.000.000,00 (*satu milyar*

lima ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

Pasal 38

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.145.005.506.124,00 (*seratus empat puluh lima milyar lima juta lima ratus enam ribu seratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.085.739.500,00 (*empat milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.046.579.223,00 (*tiga puluh sembilan milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.112.152.940,00 (*empat puluh enam milyar seratus dua belas juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.441.313.461,00 (*lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.214.721.000,00 (*dua milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.085.739.500 (*empat milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.085.739.500 (*empat milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil.

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.046.579.223,00 (*tiga puluh sembilan milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.255.760.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.876.426.800,00 (*tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.620.211.320,00 (*enam ratus dua puluh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.797.511.320,00 (*sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.741.034.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu juta tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.228.185.000,00 (*dua ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.528.173.425,00 (*tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.250.067.500,00 (*tiga milyar dua ratus lima puluh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.66.700.000,00 (*enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.346.800.000 (*satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).

- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.59.500.000,00 (*lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.869.239.700,00 (*satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.9.389.220.158,00 (*sembilan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.112.152.940,00 (*empat puluh enam milyar seratus dua belas juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.286.718.940,00 (*empat puluh lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.500.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.657.934.000,00 (*enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.441.313.461,00 (*lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.582.852.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.781.363.150,00 (*dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.799.913.311,00 (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.277.185.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.214.721.000,00 (*dua milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.318.235.000,00 (*tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima rupiah*).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.807.238.000,00 (*delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.638.048.000,00 (*enam ratus tiga puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 45

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 46

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 47

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.53.247.529.327,00 (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 48

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar Rp.53.247.529.327,00 (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.53.247.529.327,00 (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.53.247.529.327,00 (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.902.477.675,00 (*tiga belas milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp.39.345.051.652,00 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 50

Anggaran Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.902.477.675,00 (*tiga belas milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan.

Pasal 51

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.345.051.652,00 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Penghematan Belanja - Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja - Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja - Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.513.748.682,00 (*delapan belas milyar lima*

ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

- (3) Penghematan Belanja - Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.831.302.970,00 (*dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).*

Pasal 52

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah).*

Pasal 53

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.53.247.529.327,00) (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).*
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.53.247.529.327,00 (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).*

Pasal 54

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 55

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 56

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 57

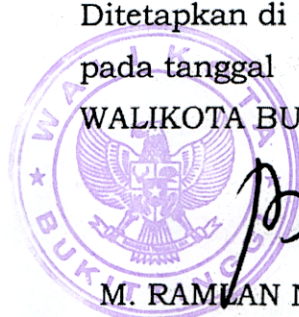
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA BUKITTINGGI,



M. Ramli S
M. RAMLIAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi

Pada tanggal 30 Desember 2020

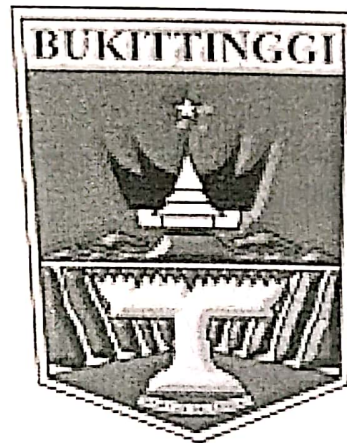
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



Yuen Karnova
YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR..... 62

**PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**



**(LAMPIRAN I)
PERATURAN WALIKOTA**

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.115.624.892
4.1.01	Pajak Daerah	40.707.014.656
4.1.01.06	Pajak Hotel	12.147.683.256
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	12.141.037.943
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	12.141.037.943
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	6.645.313
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	6.645.313
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.636.661.036
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.332.186.156
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.332.186.156
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	180.899.250
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	180.899.250
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	123.575.630
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	123.575.630
4.1.01.08	Pajak Hiburan	872.767.023
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	14.625.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	14.625.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	4.887.958
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	4.887.958
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	16.498.710
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	16.498.710
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	821.745.294

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	821.745.294
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	15.010.061
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	15.010.061
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.109.901.387
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.016.025.750
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.016.025.750
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	67.491.512
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	67.491.512
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	26.384.125
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	26.384.125
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.288.512.584
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.288.512.584
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.288.512.584
4.1.01.11	Pajak Parkir	432.088.535
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	432.088.535
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	432.088.535
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	86.977.531
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	86.977.531
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	86.977.531
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.606.028.547
4.1.01.15.01	PBBP2	3.606.028.547
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.606.028.547
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.526.394.757

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	11.526.394.757
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	11.526.394.757
4.1.02	Retribusi Daerah	28.656.743.070
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.410.371.479
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	320.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	115.451.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	204.549.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.334.860.611
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.334.860.611
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	5.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	730.008.483
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	357.502.883
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	313.369.600
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	59.136.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	213.678.800
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	213.678.800
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.124.823.585
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.124.823.585
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	10.000.000

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	172.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	172.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	22.710.371.591
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	397.568.600
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	317.160.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	80.408.600
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.825.755.352
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	2.242.113.752
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	583.641.600
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	244.818.750
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	244.818.750
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.714.278.889
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	3.714.278.889
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	180.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	180.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.318.850.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.318.850.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	29.100.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	22.500.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	6.600.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	536.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	36.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	36.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.795.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.795.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.795.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.795.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	58.956.867.166
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.186.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	214.186.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	214.186.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.814.500.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	20.064.500.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	20.064.500.000
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	750.000.000
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	750.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.900.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.900.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.900.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	40.000.000
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	20.000.000
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	10.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.099.078
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	7.099.078
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.099.078
4.1.04.13.02.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	238.528
4.1.04.15.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	238.528
4.1.04.15.07.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	238.528
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	28.950.843.560
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	28.950.843.560
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	28.950.843.560
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	30.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	30.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	30.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	583.196.715.875

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	560.311.277.875
4.2.01.01	Dana Perimbangan	514.779.721.875
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.532.530.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.309.407.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	6.842.612.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	435.017.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	560.385.000
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	256.790.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	435.274.988.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	435.274.988.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	22.400.107.075
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.591.832.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.979.428.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.651.505.425
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	750.647.650
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	3.118.610.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	179.501.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.690.293.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	477.750.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.960.540.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	44.572.096.800
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	31.109.056.000

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	237.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.236.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	652.867.800
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.200.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.262.887.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	192.550.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	240.953.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.300.540.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.206.426.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	565.256.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	862.578.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	45.531.556.000
4.2.01.02.01	DID	45.531.556.000
4.2.01.02.01.0001	DID	45.531.556.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.885.438.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22.885.438.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.885.438.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.220.469.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.993.429.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.307.415.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	82.363.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.281.762.000

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.820.500.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.820.500.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	14.820.500.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	14.820.500.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	14.820.500.000
	Jumlah Pendapatan	732.132.840.767
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	630.374.863.970
5.1.01	Belanja Pegawai	332.361.032.214
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	179.940.719.381
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	135.070.252.547
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	135.070.252.547
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.907.988.627
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.907.988.627
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.098.866.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.098.866.750
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.764.777.650
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.764.777.650
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.035.168.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.035.168.500

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.849.722.316
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.849.722.316
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	336.222.024
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	336.222.024
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.111.505
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.111.505
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.762.345.834
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.762.345.834
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	278.581.777
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	278.581.777
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	834.681.851
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	834.681.851
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	92.985.594.077
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	53.087.100.505
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.087.100.505
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.761.045.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.761.045.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	178.481.530
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	178.481.530
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	37.958.967.042
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	37.958.967.042
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.616.580.559

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.440.173.102
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	467.019.928
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	206.531.350
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	31.978.817
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	40.667.592
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	175.454.576
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	15.832.037
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.186.920
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	132.127.503
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	367.374.379
5.1.01.03.01.006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0
5.1.01.03.01.007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0
5.1.01.03.01.008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0
5.1.01.03.01.009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0
5.1.01.03.01.010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0
5.1.01.03.01.011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0
5.1.01.03.01.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	814.061.457
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	24.250.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	35.438.294
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	250.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	51.135.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	21.081.258

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	9.058.189
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	31.418.629
5.1.01.03.02.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	422.500
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.667.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.020.430
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	73.110.768
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	9.535.690
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	108.613.103
5.1.01.03.02.002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	10.455.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	402.057.596
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	25.000.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.548.000
5.1.01.03.02.004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0
5.1.01.03.02.005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0
5.1.01.03.02.006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0
5.1.01.03.02.011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0
5.1.01.03.02.013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0
5.1.01.03.02.014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0
5.1.01.03.02.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0
5.1.01.03.02.017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0
5.1.01.03.02.018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0
5.1.01.03.02.024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0
5.1.01.03.02.025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0
5.1.01.03.02.027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	31.109.056.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	31.109.056.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	237.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	237.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.972.540.000
5.1.01.03.07	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.065.815.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.785.425.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	121.300.000
5.1.01.03.07.001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.043.750.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.043.750.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.810.175.094
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	580.000.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	580.000.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	50.000.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	50.000.000

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.000.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.000.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	60.000.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	60.000.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	840.000.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	840.000.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.000.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.000.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.375.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.375.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	700.094
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	700.094
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.466.600.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.800.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.800.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.400.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.600.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.600.000.000

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	744.701.003
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.200.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.200.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	600.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	600.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.624
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.624
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.588.080
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.588.080
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	299.979.363
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	94.144.545

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	43.684.123
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.763.944
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	8.601.736
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	37.110.973
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	3.348.686
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	674.076
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.946.721
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	77.704.559
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	264.091.672
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.671.309
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.500.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	25.031.088
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1.495.751
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	8.717.383
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	77.500
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.333.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	21.899.604
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.713.731
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	26.899.953
5.1.01.05.11.002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	159.500.353
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	252.000

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0
5.1.01.05.11.009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0
5.1.01.05.11.011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0
5.1.01.05.11.014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	640.000.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	240.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	240.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	1.035.764.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	1.035.764.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	1.035.764.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	2.587.498.100
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	2.587.498.100
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	2.587.498.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.300.283.730
5.1.02.01	Belanja Barang	51.500.603.082
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.268.903.082
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	302.164.950
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	588.108.280
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.436.613.259
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	167.265.200

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.095.105.216
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27.000.000
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	15.640.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	110.470.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.188.552.274
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	158.061.500
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	346.770.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.947.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	126.390.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	37.595.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	39.123.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	75.250.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.634.510.976
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	874.436.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.111.879.483
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	171.212.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.256.998.400
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	861.264.428
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.069.190.750
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	712.169.380
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	61.778.440

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	217.290.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.125.257.750
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	685.971.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.950.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.127.194.000
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	0
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	233.597.850
5.1.02.01.01.005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.736.180.150
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.184.765.096
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	294.426.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	75.910.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	221.975.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.950.000
5.1.02.01.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	35.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	120.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	148.800.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	423.780.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	35.000.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	79.000.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	29.850.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	23.500.000

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	3.825.000
5.1.02.01.01.007	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	102.250.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	9.900.000
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	4.650.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	72.960.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	167.250.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	238.375.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	179.800.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	195.000.000
5.1.02.01.01.008	Belanja Pengisian Tabung Gas	0
5.1.02.01.01.009	Belanja Alat Laboratorium	0
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	0
5.1.02.01.01.011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	0
5.1.02.01.01.012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	0
5.1.02.01.01.013	Belanja Perkakas Kerja	0
5.1.02.01.01.014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	0
5.1.02.01.01.017	Belanja Bahan Peraga	0
5.1.02.01.01.020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	0
5.1.02.01.01.021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	0
5.1.02.01.01.022	Belanja Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban	0
5.1.02.01.01.025	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	0

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.026	Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan	0
5.1.02.01.01.028	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	0
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	0
5.1.02.01.01.030	Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman	0
5.1.02.01.01.032	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan	0
5.1.02.01.01.036	Belanja Barang Pakai Habis Pangan	0
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	231.700.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	231.700.000
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	0
5.1.02.01.02.002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0
5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	0
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	0
5.1.02.01.02.006	Belanja Bahan Laboratorium	0
5.1.02.01.02.007	Belanja Bahan dan Pangan	0
5.1.02.01.02.008	Belanja Bahan Makanan Ternak/Binatang	0
5.1.02.01.02.010	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.013	Belanja Ban Alat-Alat Berat	0
5.1.02.01.02.017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.018	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus	0
5.1.02.01.02.019	Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.020	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat	0
5.1.02.01.02.022	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	0

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.02.023	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus	0
5.1.02.01.02.024	Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.025	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset	0
5.1.02.01.02.028	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	0
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	0
5.1.02.01.04.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
5.1.02.01.04.003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	0
5.1.02.01.04.005	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0
5.1.02.01.04.006	Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.001	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0
5.1.02.01.05.002	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0
5.1.02.01.05.003	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0
5.1.02.01.05.004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.05.005	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0
5.1.02.01.05.006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0
5.1.02.01.06	Belanja Pakaian Kerja	0
5.1.02.01.06.001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor : 60 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.06.002	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0
5.1.02.01.06.003	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.002	Belanja Pakaian Adat Daerah	0
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.01.07.004	Belanja Pakaian Olahraga	0
5.1.02.01.07.005	Belanja Pakaian Paskibraka	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	129.848.472.916
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	113.058.628.929
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.913.610.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.714.340.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	120.500.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.498.725.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.750.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	72.000.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	7.340.000
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	6.250.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	6.800.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	309.800.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	745.400.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.499.536.766
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.280.842.800
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	325.902.599

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor : 60 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.902.745.709
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.671.281.752
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	957.020.792
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	883.403.808
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.910.126.504
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	6.100.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	45.808.492
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.769.698.410
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	500.467.936
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.859.034.996
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.441.039.600
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Perangkat UKPBJ	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.950.135.235
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.596.244.072
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	9.580.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	146.350.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	21.200.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	15.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.769.954.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	325.647.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor : 60 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD	0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	221.049.600
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	145.350.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	86.250.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	636.132.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	650.625.000
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	988.705.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.562.170.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.056.570.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.367.120.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	53.945.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	835.167.160
5.1.02.02.01.007	Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	0
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	27.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	13.918.129.698
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	118.030.000
5.1.02.02.01.009	Belanja Jasa Rohaniawan	0
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.011	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0
5.1.02.02.01.012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0
5.1.02.02.01.013	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	0
5.1.02.02.01.014	Belanja Telepon	0

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.015	Belanja Air	0
5.1.02.02.01.016	Belanja Listrik	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	0
5.1.02.02.01.019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	0
5.1.02.02.01.020	Belanja Paket/Pengiriman	0
5.1.02.02.01.021	Belanja Sertifikasi	0
5.1.02.02.01.024	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.02.01.025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	0
5.1.02.02.01.026	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	0
5.1.02.02.01.031	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0
5.1.02.02.01.032	Belanja Perawatan Pasien Tidak Mampu	0
5.1.02.02.01.033	Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu	0
5.1.02.02.01.034	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0
5.1.02.02.01.040	Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	0
5.1.02.02.01.041	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	0
5.1.02.02.01.044	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga	0
5.1.02.02.01.045	Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum	0
5.1.02.02.01.047	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	0
5.1.02.02.01.058	Belanja Jasa Akomodasi	0
5.1.02.02.01.060	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0
5.1.02.02.01.063	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0
5.1.02.02.01.067	Belanja Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah)	0
5.1.02.02.01.069	Belanja Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	0

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.071	Belanja Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan	0
5.1.02.02.01.075	Belanja Jasa Operator Teknisi	0
5.1.02.02.01.078	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	0
5.1.02.02.01.084	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.199.949.506
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi	0
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.745.156.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.211.614.918
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	52.589.784
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	65.588.004
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	125.000.000
5.1.02.02.02.001	Belanja Asuransi Kesehatan	0
5.1.02.02.02.002	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	92.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	92.000.000
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.035.500.000
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	15.000.000
5.1.02.02.04.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	20.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	153.700.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.900.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	271.250.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.000.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	41.500.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	197.700.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	614.955.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	234.660.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	165.235.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	67.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	48.600.000
5.1.02.02.04.0321	Belanja Sewa Alat Peraga Kejuruan	6.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	89.000.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	80.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.288.150.004
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Alat Berat	0
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	241.250.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.446.850.004
5.1.02.02.05.001	Belanja Sewa Ekskavator	0
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	31.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.150.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	3.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	559.400.000

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.009	Belanja Sewa Generator Set	0
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0
5.1.02.02.06.001	Belanja Sewa Meja/Kursi	0
5.1.02.02.06.004	Belanja Sewa Tenda	0
5.1.02.02.06.007	Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya	0
5.1.02.02.06.008	Belanja Sewa Sound System	0
5.1.02.02.06.009	Belanja Sewa Alat Kesenian	0
5.1.02.02.06.011	Belanja Sewa Alat Kerja	0
5.1.02.02.06.012	Belanja Sewa Level/Panggung	0
5.1.02.02.06.013	Belanja Sewa Alat/Peraga	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	34.500.000
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	0
5.1.02.02.07.001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0
5.1.02.02.07.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	34.500.000
5.1.02.02.07.003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0
5.1.02.02.07.005	Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer	0
5.1.02.02.07.007	Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ Ekonomi/Sosial/Budaya	0
5.1.02.02.07.008	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	0
5.1.02.02.07.010	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.235.520.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	452.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	145.200.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	195.820.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	25.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	70.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	32.500.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	225.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	90.000.000
5.1.02.02.08.014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	0
5.1.02.02.09	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.114.510.684
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	348.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	212.924.084
5.1.02.02.09.001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	447.386.600
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	476.750.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	629.450.000
5.1.02.02.09.002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	0
5.1.02.02.10.001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0
5.1.02.02.10.003	Belanja Bimbingan Teknis	0
5.1.02.02.10.004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	222.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	90.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	132.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.972.038.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.778.766.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	193.272.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	217.118.266
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	68.139.689
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	31.617.578
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.895.590
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.225.741
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	26.860.081
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.423.703
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	487.881
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.227.204
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	56.240.799
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	378.557.527
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.633.407
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.365.000
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	9.761.601
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	130.000
5.1.02.02.14.0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	16.105.168
5.1.02.02.14.0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.000
5.1.02.02.14.0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	46.277.395
5.1.02.02.14.0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	991.516

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	50.200.888
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	216.492.552
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.411.731.392
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	22.530.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	22.530.000
5.1.02.03.01.005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.703.006.849
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	134.000.000
5.1.02.03.02.0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	253.191.240
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	485.345.000
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	18.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	282.672.500
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	3.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.750.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.000.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	507.887.109
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.327.500.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	396.610.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.045.222.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	876.250.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.651.622.500
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	336.469.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	270.000.000

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	22.052.500
5.1.02.03.02.0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	1.000.000
5.1.02.03.02.0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	500.000
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	10.000.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	6.710.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	452.110.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	29.550.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.910.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	193.480.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.500.000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	10.000.000
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	5.000.000
5.1.02.03.02.035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0
5.1.02.03.02.036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.1.02.03.02.037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0
5.1.02.03.02.0370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	1.900.000
5.1.02.03.02.038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	14.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	140.065.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	62.480.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17.070.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	80.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.050.000
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	6.050.000
5.1.02.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	750.000
5.1.02.03.02.0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	1.310.000
5.1.02.03.02.065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	0
5.1.02.03.02.096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.02.102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	0
5.1.02.03.02.111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0
5.1.02.03.02.112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	0
5.1.02.03.02.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0
5.1.02.03.02.120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0
5.1.02.03.02.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0
5.1.02.03.02.123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.1.02.03.02.124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0
5.1.02.03.02.133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0
5.1.02.03.02.204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0
5.1.02.03.02.205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0
5.1.02.03.02.232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0
5.1.02.03.02.237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0
5.1.02.03.02.248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0
5.1.02.03.02.250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0
5.1.02.03.02.251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	0
5.1.02.03.02.366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	0

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0
5.1.02.03.02.371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0
5.1.02.03.02.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0
5.1.02.03.02.406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0
5.1.02.03.02.409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0
5.1.02.03.02.410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0
5.1.02.03.02.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0
5.1.02.03.02.446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0
5.1.02.03.02.451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0
5.1.02.03.02.492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.921.325.058
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.219.282.270
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	111.073.100
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	151.000.000
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	115.795.000
5.1.02.03.03.002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	117.675.000
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	100.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	6.499.688
5.1.02.03.03.012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0
5.1.02.03.03.017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	0

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0
5.1.02.03.03.033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0
5.1.02.03.03.036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0
5.1.02.03.03.037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0
5.1.02.03.03.050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.499.369.485
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	819.225.978
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	327.658.485
5.1.02.03.04.004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	219.000.000
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	358.498.172
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	13.500.000
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	82.000.000
5.1.02.03.04.0117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	106.486.850
5.1.02.03.04.0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	60.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	56.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	447.000.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.04.026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0
5.1.02.03.04.074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	0
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.265.500.000
5.1.02.03.05.0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang	2.215.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.05.0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	500.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	50.000.000
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.06.001	Belanja Jasa Servis	0
5.1.02.03.06.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	0
5.1.02.03.06.003	Belanja Minyak Pelumas	0
5.1.02.03.06.004	Belanja Jasa KIR	0
5.1.02.03.06.007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	45.129.120.025
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.949.120.025
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.002.025.294
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.276.882.731
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.494.570.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.175.642.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	180.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	180.000.000
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.04	Belanja Pemulangan Pegawai	0
5.1.02.04.04.002	Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	0

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.756.450.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.749.450.000
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.528.800.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	64.750.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	155.900.000
5.1.02.05.01.001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0
5.1.02.05.01.002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.000.000
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0
5.1.02.05.03.001	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	0
5.1.02.05.03.002	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	0
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.277.448.300
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.277.448.300
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.277.448.300
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.365.708.015
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.365.708.015
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.365.708.015
5.1.05	Belanja Hibah	25.022.748.026
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.287.100.500

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.508.472.500
5.1.05.05.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.278.472.500
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	230.000.000
5.1.05.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.213.628.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.016.628.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.197.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	565.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	475.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	90.000.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.04.001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.647.526
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.647.526
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.647.526
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.690.800.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	100.800.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	100.800.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	100.800.000
5.1.06.01.02.001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu ...	0
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.540.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.540.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.540.000.000
5.1.06.03.02.001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	0
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000
5.1.06.04.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...	0
5.2	BELANJA MODAL	145.005.506.124
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.085.739.500
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	4.085.739.500
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.085.739.500
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	4.085.739.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.046.579.223
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	255.760.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	93.000.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	93.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	162.760.000
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	4.500.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	156.260.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	2.000.000
5.2.02.01.03.008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0
5.2.02.01.03.012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.876.426.800

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.720.426.800
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.143.750.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.276.790.200
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	241.566.600
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	158.320.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	500.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.400.000.000
5.2.02.02.01.001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0
5.2.02.02.01.002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.2.02.02.01.004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.02.01.006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	156.000.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.000.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	151.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	620.211.320
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	511.450.000
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	500.000.000
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	2.750.000
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	4.000.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.700.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	10.737.400
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	10.737.400
5.2.02.03.02.007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03.02.008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	0
5.2.02.03.02.009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0
5.2.02.03.02.010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	98.023.920
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	31.647.920
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.500.000
5.2.02.03.03.001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.500.000
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	5.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	58.376.000
5.2.02.03.03.004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0
5.2.02.03.03.008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0
5.2.02.03.03.009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0
5.2.02.03.03.010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.250.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.250.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	250.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	5.000.000
5.2.02.04.01.006	Belanja Modal Alat Processing	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.797.511.320
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.528.248.000
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	7.000.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	700.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	28.871.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.491.677.000
5.2.02.05.01.004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.978.633.320
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.997.100.000
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.824.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	75.000.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.995.600
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.445.290.600
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	456.423.120
5.2.02.05.02.001	Belanja Modal Meubelair	0
5.2.02.05.02.003	Belanja Modal Alat Pembersih	0
5.2.02.05.02.004	Belanja Modal Alat Pendingin	0
5.2.02.05.02.005	Belanja Modal Alat Dapur	0
5.2.02.05.02.006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	290.630.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.950.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.950.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	50.000.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	99.730.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	121.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	741.034.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	730.034.000

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	648.197.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	81.837.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	11.000.000
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	6.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.000.000
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	228.185.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	228.185.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	39.060.000
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	189.125.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.528.173.425
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.838.188.000
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	1.000.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	3.280.000
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	3.645.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	2.830.263.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	192.120.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	192.120.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	497.865.425
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	497.865.425
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.250.067.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.051.617.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	135.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	877.026.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.039.591.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.198.450.500
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	66.940.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	514.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	617.510.500
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.500.000
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	1.500.000
5.2.02.13.02.0002	Belanja Modal Produksi Lainnya	1.500.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	66.700.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	35.700.000
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	5.700.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	12.600.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	17.400.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	31.000.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	31.000.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1.346.800.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.346.800.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	1.346.800.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	59.500.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	59.500.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	32.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	27.500.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.000.000
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	1.800.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	9.200.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.869.239.700
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.869.239.700
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.869.239.700
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.389.220.158
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.389.220.158
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.389.220.158
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.112.152.940
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.286.718.940
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.086.718.940

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.455.280.758
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	465.670.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.397.200.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.744.260.000
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	187.800.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	228.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	5.248.804.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	213.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	200.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	627.579.658
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	319.124.524
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	77.500.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	77.500.000
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	77.500.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	657.934.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	657.934.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	200.000.000
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	457.934.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	90.000.000

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	90.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	90.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.441.313.461
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22.582.852.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	21.962.602.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	11.094.937.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	10.867.665.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	620.250.000
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	620.250.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	25.781.363.150
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.456.390.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.456.390.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.944.115.650
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.944.115.650
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	18.380.857.500
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	18.380.857.500
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.799.913.311
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.956.162.793
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	3.330.882.000
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	625.280.793
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	843.750.518
5.2.04.03.03.0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	0
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	843.750.518

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor : 60 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	277.185.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	52.185.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	52.185.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	225.000.000
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	212.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	13.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.214.721.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	318.235.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	116.235.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	37.000.000
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	79.235.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	202.000.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	202.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	807.238.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	787.238.000
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	787.238.000
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	20.000.000
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	20.000.000
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	200.000.000
5.2.05.03.01	Belanja Modal Hewan Piaraan	200.000.000
5.2.05.03.01.0003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang	200.000.000
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	1.200.000
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	1.200.000

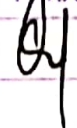

KOTA BUKITINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	1.200.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	638.048.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	638.048.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	638.048.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	250.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	105.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	105.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	105.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
	Jumlah Belanja	785.380.370.094
	Total Surplus/(Defisit)	(53.247.529.327)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.247.529.327
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.247.529.327
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	13.902.477.675
6.1.01.04.01	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	13.902.477.675

Lampiran I : Peraturan Walikota Bukittinggi
 Nomor : 60 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KOTA BUKITTINGGI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.04.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	13.902.477.675
6.1.01.05	Penghematan Belanja	39.345.051.652
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	18.513.748.682
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.000.000.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	4.006.093.729
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.507.654.953
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	20.831.302.970
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	13.664.536.322
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	939.340.788
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	6.227.425.860
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	53.247.529.327
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	53.247.529.327

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	KABAG HUKUM & HAM		30/12-20
2	ASISTEN I		
3	SERDA		30/12 20

Walikota Bukittinggi


 M. RAMLAN NURMATIAS